



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SELAMAT INDRA WIJAYA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarnegara, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA,

(FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.)

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

(SELAMAT INDRA WIJAYA, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran kejaksaan RI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90%
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan	90%
3	Meningkatnya tertib penyelenggaraan tata kelola aset	Tingkat pemenuhan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara	85%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dari masing-masing Salkes	80%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan Umum	Rp 30.000.000
2	Layanan Perkantoran	Rp 7.129.233.000
3	Layanan Sarana Internal	Rp 215.000.000
4	Layanan Prasarana Internal	Rp 300.000.000
Jumlah		Rp 7.674.233.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Banjarnegara, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

(FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.)

(SELAMAT INDRA WIJAYA, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MOH. HUDATUL MUTAQIM, S.H.
Jabatan : KAUR PERLENGKAPAN DATA STATISTIK KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarnegara, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA,

(FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.)

Pihak Pertama,

KAUR PERLENGKAPAN DATA STATISTIK
KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA,

(MOH.HUDATUL MUTAQIM, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAUR PERLENGKAPAN DATA STATISTIK KRIMINAL DAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy air, ekonomi kreatif ,ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan Lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, Teknologi Pendidikan , kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas .
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik , huku, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

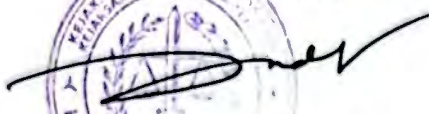
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan	90%
2	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Tata Kelola Aset	Tingkat Pemenuhan Inventarisasi dan Peloparan Barang Milik Negara	85%

NO	RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN
1.	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Rp. 215.000.000,-
2.	Pembangunan Renovasi gedung dan Bangunan	Rp. 300.000.000,-

Banjarnegara, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA,



(FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.)

Pihak Pertama,

KAUR PERLENGKAPAN DATA STATISTIK
KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA,



(MOH.HUDATUL MUTAQIM, SH.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROMA PURWATI
Jabatan : KAUR TATA USAHA KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN
PNBP

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Banjarnegara, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA,

(FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.)

Pihak Pertama,

KAUR TATA USAHA KEPEGAWAIAN DAN
KEUANGAN DAN PNBP
KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA,

(ROMA PURWATI.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAUR TATA USAHA KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN PNBK KEJAKSAAN
NEGERI BANJARNEGARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy air, ekonomi kreatif ,ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan Lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, Teknologi Pendidikan , kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas .
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik , hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran kejaksaan RI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90%

NO	RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN
1	Layanan Umum	Rp. 30.000.000,-
2	Layanan Perkantoran	Rp. 7.129.233.000,-

Banjarmegara, Januari 2025

Pihak Kedua,

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA,**



(FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.)

Pihak Pertama,

**KAUR TATA USAHA KEPEGAWAIAN DAN
KEUANGAN DAN PNBP
KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA,**



(ROMA PURWATI.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TAUFIK HIDAYAT, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarnegara, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA,

(FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,

(TAUFIK HIDAYAT, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	100%
2	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	100%
3	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	100%
4	Meningkatnya kegiatan	Persentase Kegiatan Pengamanan	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	Pengamanan Pembangunan Strategis	Pembangunan Strategis	90%
5	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	100%
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	100%
7	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	80%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan	Rp40.000.000
2	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	Rp58.008.000
3	Kampanye Anti Korupsi	Rp20.000.000
4	Penerangan Hukum	Rp38.976.000
5	Penyuluhan Hukum	Rp52.400.000
Jumlah		Rp209.384.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Banjarnegara, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA,



(FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,

(TAUFIK HIDAYAT, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YOGI ABILIO PANGESTU, S.H.
Jabatan : KASUBSI EKONOMI, KEUANGAN, DAN PENGAMANAN
PEMBANGUNAN STRATEGIS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarnegara, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA,



(FADHILA MAYA SARI S.H., M.Kn.)

Pihak Pertama,

KASUBSI EKONOMI, KEUANGAN, DAN
PENGAMANAN PEMBANGUNAN
STRATEGIS,

(YOGI ABILIO PANGESTU, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBSI EKONOMI, KEUANGAN, DAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN
STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	100%
2	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	90%

No	Rincian Output	Anggaran
1.	Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 40.000.000

Banjarnegara, Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA,




(FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.)

Pihak Pertama,
KASUBSI EKONOMI, KEUANGAN, DAN
PENGAMANAN PEMBANGUNAN
STRATEGIS,



(YOGI ABILIO PANGESTU, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TEGUH ISKANDAR, S.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

Seiaku alasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarnegara, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA

(FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

(TEGUH ISKANDAR, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	60%
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan	75%
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan	80%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi	70%
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	80%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pra Penuntutan	Rp 25.410.000
2	Pra Penuntutan dan Penuntutan	Rp 160.930.000
3	Upaya Hukum Dan Pelaksanaan Eksekusi	Rp 20.000.000
4	Restorative Justice	Rp 7.720.000
Jumlah		Rp 214.060.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.


Banjarnegara, Januari 2025


Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,


(FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.)


(TEGUH ISKANDAR, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGIL JANURI UTOMO, S.H.
Jabatan : KASUBSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI, DAN EKSAMINASI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarnegara, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA

(FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.)

Pihak Pertama,

KASUBSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI,
DAN EKSAMINASI,

(AGIL JANURI UTOMO, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI, DAN EKSAMINASI KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	60%
2.	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan	80%
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (Berkekuatan hukum	70%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		tetap) yang telah dieksekusi	

No	Rincian Output	Anggaran
1.	Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 7.720.000
2.	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 160.930.000
3.	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 20.000.000

Banjarnegara, Januari 2025


Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA,


(FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.)

Pihak Pertama,

KASUBSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI,
DAN EKSAMINASI,


(AGIL JANURI UTOMO, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EKA ILHAM FERDIADY, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarnegara, 5 Juni 2025

Pihak Kedua,


KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA,
(FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,
(EKA ILHAM FERDIADY, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	50%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	100%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	50%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	100%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	50%
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	50%
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	50%
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	50%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	50%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	50%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelidikan	Rp. 92.082.000
2	Penyidikan	Rp. 206.000.000
3	Pra Penuntutan dan Penuntutan	Rp. 239.900.000
4	Eksekusi	Rp. 11.080.000
Jumlah		Rp. 549.062.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Banjarnegara, Juni 2025

Pihak Kedua,

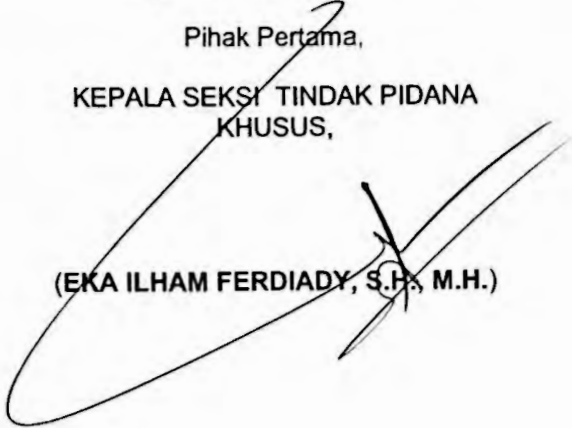
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA,



(FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,



(EKA ILHAM FERDIADY, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI SITTI CHADRA KIMIAH R, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarnegara, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,

(FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.)

(ANDI SITTI CHADRA KIMIAH R, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	0%
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi	90%
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	0%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	50%
3	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	29
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara	80%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pertimbangan Hukum	Rp. 13.200.000
2	Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa	Rp. 24.000.000
3	Perkara Perdata dan TUN yang diselesaikan di Kejaksaan Negeri	Rp. 30.000.000
4	Halo JPN	Rp. 6.000.000
5	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	Rp. 7.200.000
Jumlah		Rp. 80.400.000

D. PRIORITAS NASIONAL : -

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Banjarnegara, Januari 2025

Pihak Kedua,


Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,



(FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.)



(ANDI SITI CHADRA KIMIAH R, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANITA MAIMUNAH, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

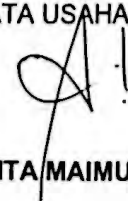
Banjarnegara, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA,

(FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA,

(ANITA MAIMUNAH, S.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	0%
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi	90%
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	0%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	50%
3	Meningkatnya penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata	Persentase penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata	0%
4	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	100%

No	Rincian Output	Anggaran
1.	Pertimbangan Hukum/Penampingan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp 13.200.000
2.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 30.000.000

D. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Banjarnegara, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA,

(FADHILA MAYA SARI, S.H., M.Kn.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA,

(ANITA MAIMUNAH, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YULI FITRIYANTI, S.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FADHILA MAYA SARI, S.H.,M.Kn.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjar negara, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
BANJARNEGARA,

(FADHILA MAYA SARI, S.H.,M.Kn.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BB,

(YULI FITRIYANTI, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI
KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	50%
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	50%
2	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	80%

N o	Kegiatan	Anggaran
1	Pemeliharaan	Rp. 25.000.000
2	Pemusnahan	Rp. 25.000.000
3	Penyelesaian	Rp. 25.000.000
Jumlah		Rp. 75.000.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Banjarnegara, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARNEGARA,

(FADHILA MAYA SARI, S.H.,M.Kn.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BB,

(YULI FITRIYANTI, S.H.)